**ABSTRAK**

 **Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, masalah utama dalam penelitian adalah kinerja pegawai yang masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut: kuantitas kerja, masih rendah yang mengakibatkan dinamika perubahan regulasi terhambat. Job knowledge, masih rendah sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi belum optimal. Hal ini salah satunya belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal DPMPTSP untuk pelayanan perizinan dan aspek pendukungnya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menduga disebabkan oleh: kurangnya tanggung jawab pegawai dan kurangnya kemampuan yang dimiliki pegawai.**

 **Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan, wawancara, dan penyebaran angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi *rank spearman*, uji reabilitas dengan menggunakan rumus *Alpha*, dan analisis regresi untuk menguji seberapa besar pengaruh. Populasi pada penelitian ini adalah Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung dan respondennya adalah seluruh pegawai di Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung yang berjumlah 43 orang.**

 **Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan, bahwa perilaku birokrasi memiliki pengaruh yang cukup moderat terhadap kinerja pegawai yaitu sebesar 0,169 dan bisa dikatakan terdapat pengaruh yang cukup erat, sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebesar 0,831. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai pengaruh perilaku birokrasi terhadap kinerja pegawai teruji.**

 **Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) perilaku birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di DPMPTSP Kota Bandung. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Perilaku Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sekretariat DPMPTSP Kota Bandung yaitu, kurangnya wewenang dari kepala bagian dan kurangnya pendidikan dan pelatihan. (3) Usaha-usaha yang dilakukan untuk hambatan-hambatan yaitu, kepala bagian lebih mempertegas wewenang dalam membuat keputusan, membuat standar operating prosedur yang fleksibel kepada pegawai, lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan pengajuan diklat harus secara rutin agar tujuan organisasi dapat tercapai, dan memberikan teguran kepada pegawai yang tidak teliti dalam hal pekerjaan, khususnya kesalahan di website DPMPTSP Kota Bandung, dalam hal susunan struktur organisasi DPMPTSP Kota Bandung yang tidak sesuai di Lakip DPMPTSP Kota Bandung.**